

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur : 2023 : Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel : Urusan Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Risiko Strategis OPD Jumlah angkatan kerja yang terserap lapangan kerja kecil	RSO.BID01.01	Pelatihan dan bimtek peningkatan kompetensi	1. Peserta belum seluruhnya tepat sasaran dan terpantau apa yang dilakukan setelah mendapat pelatihan 2. Materi pelatihan belum sesuai kebutuhan perusahaan	1. Laporan terkait pekerjaan peserta setelah mengikuti pelatihan (by name by adress) Monev 2. Untuk penyusunan kamus usulan pelatihan yang akan datang memperhatikan indikator kinerja yang di dalamnya terdapat materi pelatihan yang sesuai kebutuhan perusahaan	Kepala Bidang	Desember 2023
2	Belum ada follow up hasil penyuluhan dan bimbingan jabatan	RSO.BID01.04	-	-	Bursa Tenaga Kerja Mini gabungan dengan BKK yang bekerjasama dengan perusahaan	Kepala Dinas dan Kepala Bidang	2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Gelang Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
3	Pengawasan untuk Pelaku Usaha yang menjual minuman beralkohol masih belum optimal	RSO.BID03.03	<ol style="list-style-type: none"> Pemantauan dari OSS Tim pengawasan melakukan survei ke lapangan (Dinas teknis, SATPOL PP, APH, Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi) 	Kegiatan tim pengawasan ke lapangan seringkali tertunda karena padatnya jadwal Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi dan menyesuaikan jadwal dinas teknis serta APH.	<ol style="list-style-type: none"> Merencanakan penambahan SDM di Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi Selain kegiatan pengawasan lapangan, juga melakukan kegiatan pemanggilan kepada pelaku usaha dengan membawa semua dokumen perizinan dan membuat BAP nya Meningkatkan koordinasi untuk operasi gabungan dengan Dinas Teknis dan APH perihal kegiatan pengawasan 	Kepala Disnaker PMPTSP Kepala Dinas teknis Satpol PP APH	<ol style="list-style-type: none"> 2024 (perencanaan penambahan SDM) Desember 2023 (kegiatan pengawasan dengan memanggil pelaku usaha, koordinasi dengan dinas teknis dan APH)
4	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal belum optimal	RSO.BID03.04	Bekerjasama dengan bidang lain dan OPD teknis untuk melakukan pemantauan sesuai sasaran yang dituju	Kurang nya SDM Pemantauan	<ol style="list-style-type: none"> Penambahan personil tim pengawasan serta penguatan kapasitas personil tim pengawasan Membuat perencanaan pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Dinas Kepala Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi 	penambahan personil tahun 2024 Peningkatan kapasitas SDM (Desember 2023)
5	masyarakat tidak puas dengan hasil konsultasi dan tindak lanjut pengaduan	RSO.BID03.05	Laporan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan. Laporan hasil konsultasi	Laporan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan masih perlu penyempurnaan (karena saat ini masih prototype)	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan publikasi nomor whatsapp pengaduan Menambah jumlah nomor whatsapp layanan pengaduan (termasuk whatsapp Kepala Dinas menjawab) menyempurnakan laporan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan 	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Dinas Kepala Bidang pengendalian, pengaduan, data dan informasi 	Desember 2023
6	Pelaku usaha/investor tidak jadi melakukan ekspansi usaha di Kota Malang	RSO.BID04.01	<ol style="list-style-type: none"> sosialisasi ketentuan pembatasan perizinan ITPMB Penyusunan SOP Perizinan ITPMB 	Perangkat daerah teknis terkait dan peserta sosialisasi (pelaku usaha) belum memahami materi sosialisasi	<p>Dilakukan sosialisasi Penyusunan SOP Perizinan ITPMB</p>	Kepala Dinas Kepala Bidang 03	Februari 2024 Juli 2023

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
7	Bukti pendukung persyaratan perizinan tidak sesuai standar/palsu	RSO.BID04.05	melakukan verifikasi dan validasi lebih cermat	1. kelemahan sistem OSS 2. SDM tidak memiliki kompetensi menilai keabsahan dokumen	Berkoordinasi dengan BKPM Pusat terkait penambahan fitur upload dokumen pernyataan pelaku usaha menjamin keabsahan dokumen	Kepala Dinas Bidang 03	segera berkoordinasi dengan Bidang berwenang setelah muncul kasus dalam waktu 1 hari
II Risiko Operasional OPD							
1	Perselisihan Perusahaan dgn pekerja terkait UMK	ROO.BID01.09	Sosialisasi UMK ada sanksi secara perundangan pengawas dari provinsi	Perusahaan tidak mampu melaksanakan ketentuan terkait UMK dan tidak ada pengaduan terkait ini	Sosialisasi UMK melalui media lain agar pekerja mengetahui terkait UMK	Kabid	Tribunal ke empat 2023
2	Data dan informasi perizinan dan non perizinan kurang akurat	ROO.BID3.01	Pada saat sistem mengalami kendala dilakukan koordinasi dengan pengembang aplikasi	Selama ini belum ada	Merencanakan dan berkoordinasi dengan pihak pengembang untuk melakukan perbaikan fitur pada IZOL (fitur laporan izin masuk perlu diubah menjadi laporan permohonan masuk serta mengintegrasikan peta dari kominfo dengan izol)	Bidang Pengendalian, Data Pengaduan, dan Informasi	Desember 2023
3	Kurang nya pembinaan pelaksanaan penanaman modal	ROO.BID3.02	1. Dilakukan cek lokasi (survei lapangan) sekaligus menyampaikan ke pelaku usaha terkait kewajiban penyampaian LKPM 2. Dilakukan sosialisasi terkait LKPM kepada Pelaku Usaha 3. Program LKPM award untuk memberikan apresiasi kepada Pelaku Usaha yang patuh menyampaikan LKPM 4. Surat Teguran kepada Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan LKPM	Masih ada alamat tempat usaha tidak ditemukan atau perusahaan sudah tutup	1. Pemanggilan kepada Pelaku Usaha yang tidak terbit menyampaikan LKPM 2. Memberikan surat peringatan kepada Pelaku Usaha yang tidak terbit. 3. Mengusulkan dan melakukan pembekuan atau pencabutan izin kepada pelaku usaha yang tidak terbit LKPM 3x berturut-turut	1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Pengendalian, Data Pengaduan, dan Informasi	Desember 2023

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
4	Keterlambatan pemrosesan penerbitan pengajuan perizinan dari Pelaku usaha	ROO.BID4.01	1. pendampingan OSS 2. sosialisasi	1. Masih ada Pelaku usaha yg belum memahami sistem OSS 2. SDM ASN kurang secara kuantitas	1. Pendampingan OSS 2. Pemenuhan SDM yang kurang dengan perekrutan tenaga pendukung operasional kegiatan	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	1. Januari s/d Desember 2023 2. Desember N-1
5	Komplain dari pelaku usaha atas keterlambatan proses layanan perizinan dan non perizinan	ROO.BID4.02	1. Berkoordinasi dengan dinas teknis terkait 2. Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha	keterbatasan kewenangan	menyusun dan mengusulkan SOP perizinan dan non perizinan lintas dinas teknis terkait	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	September 2023

Menyetujui,
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ARIF TRISASTYAWAN S, STP., M.Si
Pembina IV
19790709 199810 1 001

